

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA

Yoghi Citra Pratama
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the factors that affect poverty in Indonesia. The method used in this study is a multi-linear regression, which is an analysis tool that is used to see the effect of the independent variables which are, the level of income per capita, the rate of inflation, the level of household consumption, level of education, human development index (HDI) and the poverty level as dependent variable. The data used in this study is secondary data of 33 provinces in Indonesia in 2012. From the study it can be concluded that the variable income per capita, inflation, education level human development index (HDI) and consumption simultaneously affects variable rate of poverty, it can be seen from the test that showing the level signifikansi $f < 0.05$. And from R square is known that the independent variable can explain the poverty rate by 56 percent and the remaining 44 percent would be explained by other variables whose not examined in this study.

Keywords: Poverty, IPM, Consumption, Education, Inflation, Income

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara didunia, khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara berkembang namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih dihinggap oleh masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1 \$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis apabila kita menggunakan indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2 \$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin, hal ini tercermin dalam indeks gini yang mencapai 0,4, artinya adalah terjadi disparitas yang sangat besar dalam penguasaan kekayaan atau kesejahteraan antara golongan terkaya dengan golongan yang termiskin dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sejarah menunjukkan, sejak Indonesia merdeka konsep trilogy pembangunan dengan menggunakan teori *trickle down effect* yang diadopsi oleh Indonesia pada jaman Presiden Soeharto ternyata hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu dan menghasilkan disparitas yang tinggi antara golongan kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dikarenakan sebagian besar pendapatan nasional dihasilkan dari komoditas sumber daya Minyak dan Gas bukan dari sector manufaktur maupun sektor industry lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya ketika sumber daya tersebut tidak lagi mencukupi konsumsi dalam negeri dan akhirnya Negara harus mengekspor kebutuhan Migasnya. Hal inilah yang mengakibatkan Negara mengalami devisa anggaran, seperti yang terjadi dewasa ini. Berikut data kemiskinan yang diambil dari Badan Pusat Statistic tahun 2003 hingga 2010.



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tahun 2003 kemiskinan Indonesia sebanyak 37 juta jiwa yang mengalami kemiskinan, tahun 2004 sebanyak 36 juta jiwa kemiskinan, tahun 2005 berjumlah sekitar 35 juta jiwa yang mengalami kemiskinan, tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 39,3 juta jiwa, tahun 2007 mengalami penurunan lagi menjadi 37,2 juta jiwa rakyat miskin, tahun 2008 mengalami menurunan lagi menjadi 35,0 juta jiwa rakyat miskin, tahun 2009 sekitar 32,5 juta

jiwa kemiskinan, tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 31,0 juta jiwa kemiskinan. Jadi, data kemiskinan tersebut menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2006 kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan hingga 5 % dari tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk tahun 2007 hingga tahun 2010 selalu mengalami perubahan penurunan jumlah penduduk yang miskin.

Kenaikan harga bahan bakar minyak, ditenggarai akan meningkatkan tingkat Inflasi, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat dan menambah tingkat kemiskinan. Rencana peningkatan harga BBM akan menciptakan *expected inflation* yaitu tingkat inflasi yang terjadi sebelum harga BBM tersebut dinaikan, hal ini sesuai dengan teori inflasi, yaitu masyarakat akan menurun daya beli dan tingkat kesejahteraannya dikarenakan kenaikan harga barang secara umum dengan asumsi tingkat pendapatannya tetap.

Tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahal biaya pendidikan di Indonesia jika diukur dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan tidak adanya skill dan kompetensi masyarakat untuk bisa lebih berdaya, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dari masyarakat tersebut dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, hal ini akan mengakibatkan terjadinya ingkaran kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu Negara dalam menentaskan kemiskinan.

Isu-isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan di setiap negara didunia. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs). MDGs menetapkan sebagai sasaran utamanya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) dan kelaparan pada tahun 2015. Target ini menjadi acuan kemajuan suatu negara. Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal sederhana, karena kemiskinan bersifat kompleks.

Sifat kompleks masalah kemiskinan menuntut kebijakan dan strategi penanggulangan yang terintegrasi, misalnya melalui program-program perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan manusia dan kemudahan untuk mengakses berbagai peluang sosial ekonomi yang ada. Karena berbagai keterbatasan pemerintah, program pengentasan kemiskinan ataupun kebijakan yang berorientasi pada masalah kemiskinan membutuhkan skala prioritas. Kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Jennings, 1994; Pandji-Indra, 2001).

Berbagai teori-teori pembangunan telah dikembangkan dan diimplementasikan sejak tahun 50an oleh para dinegara-negara berkembang, yang masih tertinggal secara ekonomi oleh negara-negara maju, dan mayoritas rakyatnya berada di bawah garis kemiskinan. Tetapi teori-teori tersebut belum secara maksimal berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Kesenjangan yang semakin melebar antara Negara-negara maju dengan Negara berkembang, maupun polarisasi antara miskin dan kaya yang terjadi dinegara berkembang menjadi masalah tersendiri yang dapat memicu konflik.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji-Indra, 2001).

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang

World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya

dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industry.

Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya).
- 2) Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas).
- 3) Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, *kemiskinan ekstrim (extreme poverty) atau kemiskinan absolut* adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, *kemiskinan secara umum (overall poverty), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif*, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah *kemiskinan persisten*, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relative lama. Di Amerika, yang dimaksud dengan kelompok miskin persisten adalah mereka yang telah menerima tunjangan kesejahteraan selama lebih dari 8 tahun (Berrick, 1995; Pandji-Indra, 2001). Sedangkan *kemiskinan transien* adalah situasi di mana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji-Indra, 2001). Kondisi kemiskinan transien ini dapat ditemui pada saat suatu negara dilanda krisis ekonomi atau bencana alam. Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin.

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan paparan dan data-data diatas peneliti akan mengukur seberapa besar pengaruh dari inflasi, pendidikan, pendapatan, konsumsi dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif- korelasional (kausal) yang akan menjelaskan strategi program kemiskinan yang menjadi program pemerintah dan efektifitasnya terhadap pengentasan kemiskinan, serta melakukan analisa ekonometri untuk melihat seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel bebas yaitu variabel tingkat pendapatan, tingkat konsumsi, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pendidikan, terhadap variabel terikatnya yaitu tingkat kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Apakah pengaruhnya positif atau negatif. Penelitian deskriptif merupakan penjelasan karakteristik, mengetahui profil, dan menjelaskan aspek yang relevan dari fenomena terhadap objek penelitian (Nasution dan Usman,2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multi Regression (MR)*

Model yang di gunakan adalah:

$$\text{Kemiskinan} = \alpha + \beta_1 \text{ Pendapatan} + \beta_2 \text{ Pendidikan} + \beta_3 \text{ Inflasi} + \beta_4 \text{ IPM} + \beta_5 \text{ Konsumsi} + \epsilon$$

Definisi operasional variabel *Indenpenden* dan *Dependen* dalam penelitian ini adalah :

- a. Tingkat Pendapatan rumah tangga.

Besarnya nilai pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh masyarakat dalam satuan pendapatan perkapita di 33 provinsi di Indonesia .

- b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan formal masyarakat Indonesia, dalam penelitian ini adalah angka partisipasi sekolah umur 15-18 tahun di 33 propinsi di Indonesia, yang datanya diperoleh dari berbagai sumber, baik dari badan pusat statistik maupun lembaga lainnya.

- c. Tingkat Inflasi

Kenaikan harga barang-barang secara umum dalam periode tertentu yang dihitung dalam satuan persentase di 33 provinsi Indonesia.

d. Konsumsi rumah tangga

Konsumsi rata-rata rumah tangga masyarakat di 33 provinsi Indonesia yang dihitung dalam satuan miliar rupiah yang di ubah menjadi presentase.

e. Indeks Pembangunan manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

f. Tingkat Kemiskinan

Jumlah masyarakat Indonesia yang teridentifikasi hidup dibawah garis kemiskinan di 33 provinsi Indonesia.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Presiden RI mencanangkan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), program ini menentukan titik-titik pembangunan yang dibagi kedalam enam koridor utama dari Aceh sampai Papua. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan *breakthrough* yang didasari oleh semangat "*Not Business As Usual*", melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu:

- (1) Mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku;
- (2) Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*);
- (3) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

Penyusunan MP3EI dimaksudkan bukan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti RPJPN dan RPJMN, namun akan menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer, serta penting dan khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan. (MP3EI, Kemenko Perekonomian). Dalam masa sekarang Indonesia menempati urutan ke 15 negara terbesar dalam jumlah PDB nya sehingga Indonesia masuk ke dalam Negara G-20. Tingkat PDB yang besar tersebut tidak dimbangi oleh distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata hal ini tercermin dari semakin memburuknya indeks Gini yang meningkat menjadi 0,4 dari 0,3 pada tahun 2011, ini menjadi concern bagi kita semua untuk menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan yang dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

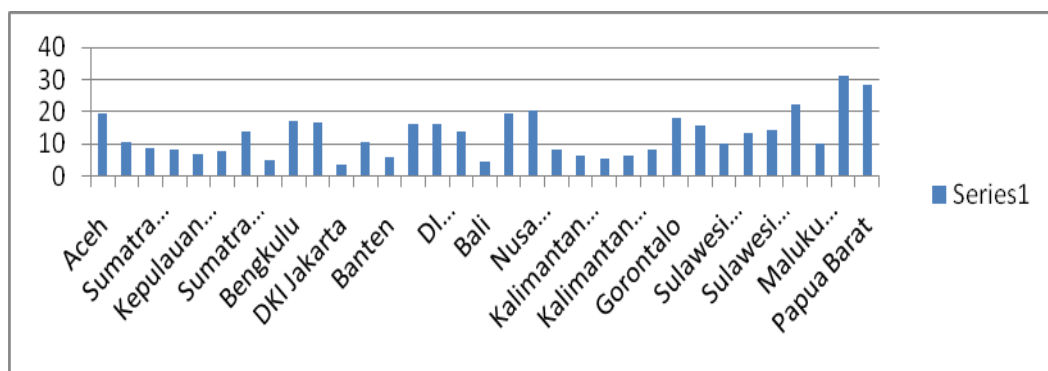
Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 % pada tahun 2011 dan diperkirakan akan mencapai menurun 6,0-6,3 % pada tahun 2012, disebabkan karena menurunnya nilai ekspor Negara kita ke Negara-negara tujuan ekspor, yang diakibatkan oleh adanya krisis global di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal juga disebabkan oleh rendahnya infrastruktur Indonesia yang mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya produksi. Birokrasi yang kompleks juga ditenggarai menjadi penghambat pembangunan ekonomi, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi salah satu hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengentasan kemiskinan.

BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai dasar dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi dan dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Bulan September 2012. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Gambar. Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia (Persentase)



Sumber: BPS 2012 (Data diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di papua yang mencapai 30% lebih, lalu disusul oleh papua Barat yang tingkat kemiskinannya mencapai 28 % dari jumlah penduduknya, hal ini menggambarkan bahwa daerah timur Indonesia khususnya kepulauan Papua belum maksimal upaya pengentasan kemiskinannya, hal ini menjadi Ironi karena daerah pulau Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya Alam. Daerah yang penduduk miskinnya terkecil adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang jumlah penduduk miskinnya kurang dari lima persen, disusul oleh provinsi Bali dan Kepulauan Bangka Belitung. Dari data diatas dapat diketahui bahwa ada 15 provinsi yang tingkat kemiskinannya mencapai lebih dari 15 persen jumlah penduduknya yaitu provinsi : Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Berikut adalah hasil analisa ekonometri dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.560	.476	4.54777	2.180

a. Predictors: (Constant), IPM, inflasi, pendapatan, pendidikan, konsumsi

b. Dependent Variable: kemiskinan

Pada output model Summary diperoleh nilai R Square sebesar 0,56 berarti kemiskinan dapat dijelaskan oleh indeks pembangunan manusia (IPM), konsumsi, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan inflasi sebesar 56 persen. Sisanya sebesar 44 persen dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti. Dari output diatas dapat disimpulkan bahwa variable yang dipilih dalam penelitian ini telah memberikan penjelasan lebih dari separuh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, ini dapat menjadi landasan pemikiran dan kebijakan untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan berfokus pada variable-variabel diatas.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	684.998	5	137.000	6.624	.000 ^a
Residual	537.737	26	20.682		
Total	1222.735	31			

a. Predictors: (Constant), IPM, inflasi, pendapatan, pendidikan, konsumsi

b. Dependent Variable: kemiskinan

Dari table anova diatas dapat dijelaskan bahwa variable konsumsi, inflasi, pendidikan, IPM dan pendapatan perkapita, secara simultan mempengaruhi kemiskinan, hal ini dapat dijelaskan dengan nilai F sig < 0,05 dan model dinyatakan cocok atau fit. Artinya secara bersama-sama variabel konsumsi, inflasi, pendidikan, IPM dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	84.786	25.786		3.288	.003
inflasi	-.746	.751	-.137	-.994	.329
pendapatan	.078	.103	.113	.761	.453
pendidikan	.271	.144	.290	1.875	.072
konsumsi	-2.972	1.308	-.396	-2.273	.032
IPM	-1.071	.420	-.513	-2.547	.017

a. Dependent Variable: kemiskinan

Dari table diatas dapat diketahui bahwa hanya konsumsi dan IPM yang mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negatif dan signifikan, artinya bahwa semakin besar konsumsi maka tingkat kemiskinan akan semakin turun, ini sesuai dengan teori, bahwa tingkat kemiskinan dapat dilihat dari jumlah konsumsinya. Berbagai macam parameter dalam mengukur tingkat kemiskinan diantaranya adalah melihat dari sisi konsumsinya. BPS menentukan bahwa tingkat konsumsi yang kurang dari 2100 kalori ditentukan sebagai masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Variabel Indeks pembangunan Manusia (IPM) juga mempengaruhi tingkat kemiskinan secara negative artinya semakin rendah tingkat IPM maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi, hal ini sesuai dengan teori bahwa IPM mencerminkan kualitas tingkat pembangunan manusia Indonesia. Tingkat indeks pembangunan manusia yang merupakan parameter untuk mengklasifikasikan Negara tersebut Negara maju, berkembang, atau terbelakang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Indonesia yang berada pada posisi 111 dari 182 negara merupakan pekerjaan rumah yang besar khususnya bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya bahwa kualitas pembangunan manusia Indonesia yang tercermin dari pengukuran perbandingan dari [harapan hidup](#), [melek huruf](#), [pendidikan](#) dan [standar hidup](#) masih berada diposisi yang memperhatikan.

Variabel inflasi dapat diketahui bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, hal ini berlawanan dengan teori bahwa semakin tinggi nilai inflasi akan menurunkan tingkat pendapatan dan kekayaan riil, serta akan menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat kemiskinan. Daerah yang sedang berkembang cenderung diikuti dengan tingkat inflasi yang tinggi, hal ini berkaitan dengan meningkatnya pendapatan dan kondisi perekonomian yang sedang berkembang pesat, situasi seperti ini

yang menjelaskan mengapa inflasi memiliki hubungan negatif dengan dengan tingkat kemiskinan, adanya *expected inflation* atau harapan kenaikan tingkat harga pada masa mendatang juga menjadi salah satu faktor penyebab inflasi.

Variabel pendapatan memiliki hubungan negative dengan kemiskinan hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi pendapatan akan menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi dari model diatas diketahui bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, hal dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan perkapita, ternyata tidak merepresentasikan secara riil pendapatan dimasyarakat dan ukuran riil kemiskinan masyarakat, hal ini juga menggambarkan bahwa distribusi pendapatan tidak berjalan optimal dan disparitas pendapatan terjadi dengan sangat lebar, sehingga nilai pendapatan perkapita tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk variabel pendidikan juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan hal ini dapat dijelaskan bahwa sektor pendidikan akan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dalam jangka pendek pengaruhnya belum terlihat. Dari data diatas juga dapat terlihat bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang positif dengan kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan perkapita, inflasi, tingkat pendidikan indeks pembangunan manusia (IPM) dan konsumsi secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variable tingkat kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari Uji f yang menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$. Dan dari R square diketahui bahwa variable variabel bebas tersebut dapat menjelaskan tingkat kemiskinan sebesar 56 persen dan artinya sisanya sebesar 44 persen dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Jalur Indeks pembangunan manusia merupakan jalur yang tepat dalam menjelaskan kemiskinan dalam penelitian ini, hal ini ditunjukan dengan hasil analisis ekonometri diatas dimana IPM dipengaruhi positif signifikan oleh variable pendidikan dan pendapatan perkapita, dan hanya inflasi yang tidak mempengaruhi IPM secara signifikan. Sedangkan jalur Konsumsi tidak dipengaruhi signifikan oleh ketiga varibel bebasnya yaitu pendidikan, tingkat pendapatan perkapita dan inflasi.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi, konsumsi, pendapatan perkapita, IPM memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan tingkat pendidikan, yang menarik adalah ternyata yang memiliki pengaruh signifikan adalah variable konsumsi dan IPM, hal menunjukkan bahwa tingkat konsumsi yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan,

karena banyak parameter konsumsi yang digunakan sebagai indikator kemiskinan. Pembangunan kualitas manusia menjadi faktor yang penting jika pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan. Tidak berpengaruhnya tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa belum berjalannya distribusi pendapatan yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi disparitas yang tinggi antara golongan yang terkaya dan termiskin, dan disparitas antara yang besar antara daerah terkaya dan termiskin, dan tingkat kemiskinan terjadi di daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau oleh pembangunan.

REFERENSI

- Ahmad Fahrezi Zali, 1999. *Distribusi Pendapatan Indonesia dan Faktor yang mempengaruhinya*. Bandung: *Jurnal Kampus Vol. XXXII, Nomor 4*, Universitas Padjadjaran.
- Ajakaiye DO, Adeyeye VA. 2002. Concept, Measurement, and Causes of Poverty. *CBN Economic & Financial Review, VOL. 39 NO. 4*
- Badan Pusat Statistik, 2012, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta
- Bhatta, Saurav Dev. 2001. Are Inequality and Poverty Harmful for Economic Growth: Evidence from the Metropolitan Areas of the United States. *Journal of Urban Affairs, Volume 23, Number 34: 335*
- Ikhsan, M. 1999. *The Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis*. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana.
- Jhingan, H.L. 2000. *Development Planning*. Singapore: The Mc.Graw-Hill Companies. Inc
- Nasution, Mustafa Edwin dan Usman, Hardius. 2007. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: LP-FEUI.
- Panji Indra. 2001. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Romer, David. 2001. *Advanced Macroeconomics*. McGraw Hill International Book Company
- Siti Parhah. 2006. Pengaruh Variabel Makroekonomi Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Vol. XXXI, No. 12, Pebruari*.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. JPS dan Pemberdayaan. Gramedia. Jakarta UNDP. 2000. *Overcoming Human Poverty*. United Nations Development Programme.
- Poverty Report 2000.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2003. *Economic Development*. Eighth Edition. The Addison-Wesley.

- Tulus, Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Valila, Timo. & Aaron Mehrotra. 2005. Evolution and Determinants of Public Investment in Europe. *Economic and Financial Report 2005/01*, pp. 1 - 37